

**PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGANTISIPASI
MARAKNYA POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM**

*POLITICAL EDUCATION AS AN EFFORT TO ANTICIPATE THE RISE OF IDENTITY
POLITICS IN GENERAL ELECTIONS*

Muhammad Hendri Nuryadi*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta 57126, Indonesia

Pipit Widiatmaka

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 14 Pontianak 78122, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 28 Juli 2022

Disetujui : 15 Januari 2023

Keywords:

political education, identity politics,
general elections

Kata Kunci:

pendidikan politik, politik identitas,
pemilihan umum

***) Korespondensi:**

E-mail: hendri@staff.uns.ac.id

Abstract: this study aims to analyze strategies for anticipating identity politics in general elections, the role and objectives of political education, as well as the implications of political education for social harmony. This study uses a qualitative approach with a library research type of research. The results of the study show that the strategy that can be used to anticipate identity politics in general elections is through political education. Political education has a role in forming a politically literate society. The aim of political education is to provide knowledge about politics to the public so that they are able to participate actively in the political system. Political education has implications for social harmony because it is carried out by upholding human values without discrimination.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis strategi untuk mengantisipasi politik identitas dalam pemilihan umum, peran dan tujuan pendidikan politik, serta implikasi pendidikan politik terhadap kerukunan masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi politik identitas dalam pemilihan umum yaitu melalui pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki peran dalam membentuk masyarakat yang melek politik. Tujuan pendidikan politik yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik. Pendidikan politik berimplikasi pada kerukunan masyarakat karena diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan teori dari Abraham Lincoln yang dianut oleh bangsa Indonesia untuk mengatur pemerintahan sehingga

dalam hal ini setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, Wakil Presiden, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap lima tahun. Pencalonan tersebut dilakukan melalui partai politik dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang termuat dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang.

Indonesia sebagai negara demokrasi selalu menyelenggarakan Pemilu secara rutin dan berkala mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Hal ini dilakukan karena terselenggaranya Pemilu merupakan salah satu indikator dari suatu negara demokrasi. Pemilu menjadi ujung tombak untuk menghindari kekuasaan monarki yang dilakukan secara turun-temurun. Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara demokratis karena semua calon pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat (*one man one vote*), meskipun dalam proses Pemilu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon pemimpin misalnya money politic atau saling menjatuhkan nama baik kandidat lain dengan berbagai cara. Fenomena yang sering terjadi untuk menjatuhkan nama baik lawan politik agar terpilih menjadi pemimpin dalam Pemilu yaitu mengangkat isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) mengingat Indonesia adalah negara multikultural. Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat serius dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa (Fatkhuri, 2021). Masyarakat Indonesia mudah diprovokasi menggunakan isu SARA sehingga sering terjadi konflik hingga berujung pada tindakan kekerasan antar pendukung calon pemimpin.

Konflik antar pendukung dengan mengangkat isu SARA dalam Pemilu sering terjadi di beberapa daerah. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 menyatakan bahwa para calon kepala daerah dan pendukungnya masih memanfaatkan isu politik identitas atau isu SARA untuk menyerang kandidat lain. Hal ini terjadi pada beberapa wilayah seperti Kota Depok, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Solok. Data yang diperoleh Bawaslu menunjukkan bahwa pada Pilkada serentak tahun 2020 ditemukan 18 peristiwa yang termasuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang dan 236 peristiwa termasuk dalam kategori tingkat kerawanan rendah (Humas Balitbang Hukum dan HAM, 2020). Politik SARA dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Hal ini menjadi masalah klasik yang seringkali terjadi dalam pemilihan kepala desa hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Saputra, 2021). Politik identitas berpotensi muncul kembali pada Pemilu tahun 2024.

Politik identitas menjadi salah satu faktor yang menurunkan indeks demokrasi di Indonesia.

Data dari *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan adanya penurunan skor indeks demokrasi Indonesia dari yang semula 6,48 menjadi 6,3 (Welle, 2021). Politik identitas pada dasarnya berdampak negatif karena dapat menjatuhkan nama baik suatu negara. Politik identitas dilatarbelakangi oleh kepentingan politik sehingga setiap orang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Direktur eksekutif Perludem mengungkapkan bahwa politik SARA dan politik identitas sering terjadi dalam Pilkada karena kaderisasi yang dilakukan partai politik terlalu lemah sehingga banyak tim sukses melakukan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Media sosial menjadi alat untuk menyebarluaskan berita bohong oleh tim sukses untuk menyerang tim lawan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia menjadi negara dengan pengguna facebook terbesar keempat di dunia yaitu sebanyak 132 juta jiwa (Yuliani, 2017). Platform tersebut dimanfaatkan oleh oknum ketika pelaksanaan Pilkada untuk menyebarkan berita yang bernuansa SARA seperti fitnah, politisasi SARA, atau berita hoax.

Politik identitas terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Barat yang seringkali menimbulkan konflik antar pendukung calon kandidat hingga berujung pada tindakan kekerasan. Data yang diperoleh Bawaslu menunjukkan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu pada Pilkada serentak tahun 2018 di Kalimantan Barat identik dengan isu politik SARA yang sangat rentan terhadap konflik (Firmansyah, 2018). Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki keberagaman etnis, ras, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi boomerang bagi masyarakat di Kalimantan Barat karena elit politik dapat merusak kerukunan masyarakat untuk mencapai kepentingan politik dalam Pilkada.

Politik identitas yang terjadi di Kalimantan Barat menimbulkan ketegangan antar etnis khususnya etnis Dayak dengan Melayu. Agama dan etnis digunakan sebagai instrumen politik untuk memenangkan Pemilu yang menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat terutama pada etnis pendatang (Jumadi & Yakoop, 2013). Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berimbas hingga ke Kalimantan Barat karena media sosial menyajikan berita yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat mudah terprovokasi dengan berita bohong

(Ruslan, 2020). Kalimantan Barat memiliki masa lalu yang sangat memprihatinkan pada Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 karena dipenuhi dengan kebencian, fitnah, serta kecurigaan hingga berujung pada konflik antar etnis dan umat beragama.

Politik identitas dapat berujung pada tindak kejahatan atau tindak pidana. Politik identitas berpotensi menimbulkan tindakan yang melawan hukum sehingga harus ditindak secara tegas (Sazali, 2021). Politik yang bernuansa SARA dapat menyebabkan disintegrasi nasional yang dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Permana & Handriana, 2020). Hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan karena menimbulkan konflik dalam masyarakat. Politik SARA dan politik identitas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.

Politik identitas pada Pilkada tahun 2018 di Kalimantan Barat semakin meningkat seiring berjalannya waktu sehingga terjadi polarisasi antar etnis dan umat beragama. Hal ini berimplikasi pada munculnya primordialisme pada masyarakat Kalimantan Barat. Pasca Pilkada suasana kebencian dan permusuhan masih membekas hampir di setiap etnis di Kalimantan Barat sehingga fenomena ini akan menjadi permasalahan yang kompleks apabila tidak segera diantisipasi (Ruslan, 2020). Pendidikan politik sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu. Pendidikan politik dapat membentuk masyarakat yang lebih cerdas dalam merespon berita yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan kajian ini membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu strategi untuk mengantisipasi politik identitas dalam pemilihan umum, peran dan tujuan pendidikan politik, serta implikasi pendidikan politik terhadap kerukunan masyarakat.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji secara teoritis suatu referensi dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan nilai, kebudayaan, aturan-

aturan tertentu, atau norma yang berkembang dalam permasalahan sosial (Sugiyono, 2013). Langkah-langkah dalam kajian ini yaitu menentukan topik penelitian, mengumpulkan data, fokus pada objek penelitian, mencari dan mengklasifikasikan dokumen, membuat catatan penelitian, melakukan review, mengklasifikasikan data kembali, serta membuat laporan (Zed, 2014). Sumber data yang digunakan dalam kajian ini yaitu ensiklopedia, artikel jurnal ilmiah, buku (ebook), prosiding seminar, media online dan media cetak, majalah, tesis, disertasi, dan skripsi (Zed, 2014). Analisis data yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis konten dengan beberapa langkah yaitu menyatukan data yang diperoleh, menentukan atau memilah data, menelaah data dengan memberikan kode di setiap data, penyederhanaan data, kesimpulan, serta membuat narasi (Moleong, 2021). Kajian ini dilakukan dengan mengamati maraknya isu SARA pada Pilkada tahun 2018, Pemilu tahun 2019, dan Pilkada tahun 2020 di Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi untuk Mengantisipasi Politik Identitas dalam Pemilihan Umum

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang sangat beragam apabila dibandingkan dengan provinsi lain, khususnya keberagaman etnis dan agama. Agama yang dianut oleh penduduk di Kalimantan Barat diantaranya yaitu agama Islam dan Konghucu bahkan terdapat aliran kepercayaan yang dianut oleh beberapa penduduk. Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Barat mayoritas beragama Islam yang berjumlah 3.251.481 penduduk (59,91%), Katolik berjumlah 1.203.137 penduduk (22,17%), Protestan berjumlah 623.839 penduduk (11,49%), Buddha berjumlah 330.638 penduduk (6,09%), Konghucu berjumlah 13.093 penduduk (0,24%), Hindu berjumlah 2.998 penduduk (0,06%), serta aliran kepercayaan berjumlah 1.889 penduduk (0,04%). Penduduk Kalimantan Barat terdiri atas berbagai macam etnis mulai dari Dayak, Melayu, Bugis, Madura, Batak, hingga Jawa. Penduduk Kalimantan Barat terdiri atas berbagai macam etnis mulai dari Dayak, Melayu, Bugis, Madura, Batak, hingga Jawa. Masyarakat di Kalimantan Barat sangat majemuk sehingga

sering terjadi konflik antar etnis dan umat beragama dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terjadi karena tim sukses melakukan kampanye dengan mengangkat isu SARA khususnya melalui media sosial seperti facebook, telegram, instagram, dan whatsapp. Isu SARA yang disebarluaskan dalam kampanye melalui media sosial berpotensi menimbulkan konflik antar etnis dan umat beragama (Aji, 2020). Fenomena tersebut menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya Pilkada, sehingga dibutuhkan suatu strategi agar kampanye yang bernuansa SARA tidak terulang kembali.

Isu SARA menjadi komoditas yang sangat luar biasa pada Pemilu serentak tahun 2019 untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD. Isu SARA berimplikasi pada timbulnya polarisasi dalam lingkungan masyarakat (Sirait, 2020). Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu memilih untuk golput dalam Pilkada tahun 2020. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak memberikan hak masyarakat terutama hak berupa pelayanan listrik. Aksi tersebut sering terjadi di berbagai daerah karena banyak oknum dari pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok (Haliim, 2020). Fenomena ini akan berdampak bagi implementasi demokrasi di Indonesia karena masyarakat bersikap apatis terhadap Pemilu. Pemerintah harus segera menyelenggarakan pendidikan politik sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Pendidikan politik menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya politik identitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan politik melalui beberapa kegiatan. Pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal seperti di sekolah menengah dan pendidikan tinggi khususnya untuk pemilih pemula. Pendidikan politik untuk masyarakat luas dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pagelaran seni dan budaya, perlombaan atau kompetisi, sosialisasi peraturan melalui kantor kelurahan atau tempat lain, atau upacara adat. Pendidikan politik dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan

umum khususnya partisipasi dalam Pemilu atau Pilkada. Partisipasi dilakukan tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan latar belakang setiap individu. Pendidikan politik dimaksudkan agar masyarakat memiliki pemahaman sekaligus kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Pendidikan politik dapat terselenggara secara maksimal dan merata di Kalimantan Barat. Pemerintah khususnya pemerintah desa menyelenggarakan pendidikan politik melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu sosialisasi dalam rapat RT atau RW, kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kegiatan di kantor pemerintah desa. Kegiatan tersebut diadakan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar etnis atau umat beragama selama pelaksanaan Pemilu. Implementasi pendidikan politik dapat mengantisipasi timbulnya sikap primordialisme dalam masyarakat selama Pemilu. Pendidikan politik sangat perlu dilakukan mengingat partai politik saat ini tidak melaksanakan pendidikan politik dengan baik, sehingga para kader-kadernya melakukan politik praktis yang bernuansa SARA.

Data dari The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dari yang semula memperoleh skor rata-rata 5,44 menjadi 5,37 (Wibowo, 2021). Skor tersebut merupakan nilai terendah sejak 14 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk meminimalisir terjadinya konflik sehingga indeks demokrasi di Indonesia dapat meningkat. Pendidikan politik tidak hanya dapat membangun keharmonisan saja, tetapi juga dapat membentuk pemerintahan yang baik (good governance) sebagai cita-cita setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia (Habibi & Untari, 2018). Indeks demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu adanya konflik antar etnis dan umat beragama dalam pelaksanaan Pemilu.

Pendidikan politik dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang melek politik. Masyarakat dapat dikatakan melek politik apabila memahami informasi terkait pemegang kekuasaan dan institusi pemerintahan, memiliki strategi untuk terlibat secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan yang dikuasai untuk kepentingan

umum, mampu memprediksi dampak dari kebijakan pemerintah, memahami tujuan kebijakan yang diputuskan dan dikeluarkan oleh pemerintah, serta mampu menerima pendapat orang lain dan melakukan evaluasi diri (Nurdiansyah, 2015). Masyarakat yang melek politik tidak mudah diprovokasi oleh oknum tertentu. Pendidikan politik dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyampaikan kritik atau saran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Peran dan Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik pada dasarnya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan politik secara formal terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Kompetensi yang ingin dibangun dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* (Rahman & Suharno, 2022). Pendidikan politik yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu, baik sebagai pemilih atau calon yang dipilih oleh rakyat. Partisipasi politik dapat berimplikasi pada indeks demokrasi di Indonesia karena kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan negara semakin meningkat.

Pendidikan politik merupakan usaha yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik. Pendidikan politik berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam sistem politik untuk menyampaikan aspirasi berupa tuntutan atau dukungan. Pendidikan politik memiliki tujuan untuk membentuk karakter bangsa sebagai tahap awal bagi masyarakat yang telah terbebas dari belenggu penjajah (Nurdiansyah, 2015). Pendidikan politik tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga formal tetapi juga partai politik, meskipun saat ini partai politik tidak menunjukkan peranan yang signifikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui pertunjukan seni budaya seperti wayang yang berusaha untuk menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila (Alfaqi, Shofa, & Habibi, 2019). Pendidikan politik diharapkan dapat menyatukan

keberagaman yang ada di Indonesia sehingga tidak mudah terpecah belah. Keberagaman di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus dijaga dan dirawat (Nuryadi, Zamroni, & Suharno, 2020). Pendidikan politik pada dasarnya dapat mengantisipasi terjadinya politik praktis yang bernuansa SARA sehingga kerukunan antar etnis dan umat beragama dapat terjaga dengan baik.

Pendidikan politik memiliki fungsi yang sangat luas untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Pendidikan politik merupakan implementasi pendidikan karakter yang berfungsi sebagai wahana untuk membangun karakter dan kesadaran masyarakat untuk berpolitik, sebagai wahana untuk kader partai politik, serta dijadikan sebagai wahana untuk internalisasi ideologi bangsa yaitu Pancasila (Nurdiansyah, 2015). Pendidikan politik dalam pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpendapat di dalam kelas atau luar (Sholahuddin & Awaliyah, 2021). Pendidikan politik dalam pendidikan formal dapat menjadi bekal bagi peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Hal ini merupakan cita-cita Ki Hajar Dewantara ketika mendeklarasikan pentingnya pendidikan untuk masyarakat Indonesia (Rohmatu, Awaliyah, & Sukriono, 2020). Pendidikan politik sangat penting untuk diimplementasikan melalui pendidikan formal maupun nonformal, karena pendidikan politik merupakan suatu proses pendidikan karakter yang berupaya untuk membangun warga negara yang melek politik.

Partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 bertujuan untuk membangun kesadaran warga negara terkait hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik juga bertujuan untuk membangun kemandirian, karakter bangsa, serta kedewasaan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Pembentukan karakter yang dimaksud yaitu membangun masyarakat Pancasila yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian berdasarkan Pancasila (Widiatmaka, 2021). Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok tertentu untuk mengikuti kehidupan politik secara aktif seperti memilih pemimpin negara atau pemimpin daerah yang pada akhirnya berkaitan

dengan pengambilan keputusan. Partisipasi politik dapat berupa aktivitas memberikan suara ketika Pemilu, menghadiri rapat, melakukan lobi dengan pemerintah atau anggota parlemen, atau terlibat dalam gerakan sosial (Budiardjo, 2003). Partai politik diharapkan dapat membentuk dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berpartisipasi politik secara aktif dalam proses menentukan kebijakan.

Partisipasi politik memiliki dua bentuk yaitu konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan hak suara dalam Pemilu, kampanye, diskusi yang berkaitan dengan politik, turut serta dalam komunitas atau kelompok kepentingan, serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan administrasi. Partisipasi politik non konvensional berkaitan dengan demonstrasi, melakukan konfrontasi dengan pemerintah, melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang atau masyarakat tertentu dengan melakukan penculikan, pembunuhan, revolusi, reformasi, atau perang gerilya (Rahman, 2018). Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi politik secara aktif dengan cara konvensional karena partisipasi politik non konvensional pada hakikatnya melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pendidikan politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu seminar nasional maupun internasional, lokakarya, sosialisasi peraturan, Bimbingan Teknis (Bimtek), asistensi, pagelaran atau pertunjukan seni, perkemahan atau jambore, serta melalui kompetisi atau perlombaan seperti pidato, jalan sehat, atau karya ilmiah. Pendidikan politik dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan bersama atau kepentingan sosial. Pendidikan politik dapat diberikan kepada setiap elemen masyarakat tanpa memandang kelas sosial maupun perbedaan suku, agama, atau ras. Pendidikan politik bersifat menyeluruh untuk kepentingan bangsa dan negara.

Implikasi Pendidikan Politik terhadap Kerukunan Masyarakat

Kerukunan antar sesama menjadi tujuan utama berdirinya negara Indonesia, dengan mengesampingkan perbedaan latar belakang untuk mencapai tujuan yang sama yaitu persatuan dan kesatuan. Masyarakat di negara multikultural

sangat sulit untuk disatukan karena memiliki perbedaan etnis, agama, ras, dan budaya. Indonesia memiliki sejarah yang membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan di negara multikultural. Bung Karno pernah menyampaikan bahwa musuh terbesar suatu bangsa adalah bangsanya sendiri. Pernyataan tersebut saat ini telah menjadi kenyataan karena banyak pengkhianat bangsa yang memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk kepentingan pribadi. Politik praktis bernuansa SARA menjadi penyakit bangsa Indonesia hingga saat ini, karena setiap diselenggarakannya Pemilu para oknum elit politik selalu mengangkat isu SARA untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Politik praktis yang bernuansa SARA dalam Pemilu dapat memprovokasi masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan konflik antar etnis dan umat beragama. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat belum memahami politik sehingga mudah diprovokasi oleh oknum tertentu melalui media sosial. Pendidikan politik menjadi salah satu solusi agar masyarakat menjadi melek politik sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya (Ridha & Riwanda, 2020). Pendidikan politik tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal saja tetapi dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat (Aziz, dkk., 2021). Konflik antar etnis dan umat beragama dapat diminimalisir apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat mengenai politik. Pendidikan politik pada dasarnya berimplikasi pada kerukunan antar etnis dan umat beragama.

Isu SARA dalam Pemilu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerukunan antar etnis dan umat beragama. Hasil survei yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama pada tahun 2018 terdapat enam isu aktual yang mempengaruhi kerukunan antar etnis dan umat beragama diantaranya yaitu bantuan sosial, pelarangan simbol agama, kebijakan dari pemerintah daerah, terorisme, isu SARA dalam Pemilu, serta isu komunis dan tenaga kerja asing (Muntafa, 2019). Faktor-faktor tersebut harus dijadikan fokus utama untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik dapat mengantisipasi terjadinya politik praktis yang bernuansa SARA

dalam pelaksanaan Pemilu. Pendidikan politik merupakan usaha untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud yaitu toleransi dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Masyarakat tidak akan mudah terprovokasi apabila mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerukunan dalam perbedaan dapat terwujud melalui beberapa cara yaitu menjalin kehidupan tanpa adanya kecurigaan antar etnis atau agama, adanya semangat saling menghormati dan menghargai antar sesama, terjalinnya kerja sama tanpa memandang perbedaan latar belakang, serta adanya interaksi dan saling membantu tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu (Rahmanika, dkk., 2018). Hal ini dapat menciptakan keharmonisan dalam perbedaan sehingga kerukunan dalam masyarakat dapat terwujud karena Pemilu dapat dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pendidikan politik memberikan ruang demokrasi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi memberikan posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepada masyarakat, sehingga pembuat kebijakan berada di bawah kontrol masyarakat. Negara yang demokratis selalu berupaya untuk mewujudkan prinsip dan nilai demokrasi yang mengedepankan persamaan, kebebasan, dan pluralisme sehingga persatuan di negara yang beragam dapat terwujud (Masamah, 2016). Persamaan dan kebebasan merupakan kunci utama di negara demokrasi yang menjadi hak setiap warga negara tanpa memandang perbedaan etnis dan agama. Pemilu di negara demokrasi secara tegas melarang adanya isu SARA karena dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kualitas Pemilu. Politik tanpa isu SARA dapat meminimalisir terjadinya disintegrasi nasional.

SIMPULAN

Strategi untuk mengantisipasi politik identitas dalam pemilihan umum dapat dilakukan melalui pendidikan politik. Pendidikan politik dapat meminimalisir terjadinya politik praktis yang bernuansa SARA dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pendidikan politik berperan dalam membentuk masyarakat yang melek politik. Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang politik kepada

masyarakat sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik. Pendidikan politik berimplikasi pada kerukunan masyarakat karena diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud yaitu toleransi dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, M. P. (2020). Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 179-194. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.885>
- Alfaqi, M. Z., Shofa, A. M. A., & Habibi, M. M. (2019). Peran Pemuda dalam Pelestarian Wayang Suket sebagai Aktualisasi Nilai Moral Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 368-380. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p368-374>
- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Maulana, Y., & Rahmiati, D. (2021). Pola Relasi Pusat dan Daerah Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 77-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i1.967>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. (2019). *Profil Pembangunan Kalbar 2019*. Diakses dari <https://bappeda.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/01/PROFIL-KALBAR-2019-OKE.pdf>.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatkhuri. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara di SD Katolik Karya Tobaoli Kepulauan Bangka Belitung. *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 18(2), 149-167. <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2>
- Firmansyah, A. (2018). *Kalimantan Barat Kental Isu SARA*. Diakses dari <http://harnas.co/2018/04/23/kalimantan-barat-kental-isu-sara>.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 159-168.
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan

- Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi terhadap Kekuasaan Kepemimpinan dan Perilaku Elit. *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 17(1), 39-53. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i1.136>
- Humas Balitbang Hukum dan HAM. (2020). *Pilkada Serentak 2020 Masih diliputi Isu Politik Identitas dan SARA*. Diakses dari <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/pilkada-serentak-2020-masih-diliputi-isu-politik-identitas-dan-sara>.
- Jumadi & Yakoop, M. R. (2013). Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 17-34.
- Masamah, U. (2016). Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, dan Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4(1), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1638>
- Menteri Dalam Negeri. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntafa, R. U. F. (2019). *Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2018*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1), 22-35.
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik bagi Warga Negara dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 54-58.
- Nuryadi, M. H., Zamroni, & Suharno. (2020). The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions. *European Journal of Educational Research*, 9(2), 799-807. <https://doi.org/10.12973/eu-er.9.2.799>
- Permana, U., & Handriana, I. (2020). Pengaruh Politisasi SARA terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 126-135. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.930>
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8385>
- Rahman, A., & Suharno. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Rahmanika, K., Pratiwi, D. W., Santoso, A. P., Susilowati, E., & Yunarta, F. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama di Kecamatan Prambanan. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(1), 119-142.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110-121.
- Rohmatu, H. P., Awaliyah, S., & Sukriono, D. (2020). Kajian Komparatif Sistem Among dan Metode Montessori. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 261-272. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p261-270>
- Ruslan, I. (2020). Pelintiran Kebencian (Hate Spin): Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat. *Al Hikmah*, 14(1), 189-212.
- Saputra, M. G. (2021). *Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN Masih Potensial Terjadi di Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/politisasi-isu-sara-dan-netralitas-asn-masih-potensial-terjadi-di-pemilu-2024.html>.
- Sazali, H. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram. *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 18(1), 79-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i1>
- Sholahuddin, A., & Awaliyah, S. (2021). Pengembangan Model Pembelajaran

- Innovation Active Debat untuk Meningkatkan Keterampilan Menyampaikan Pendapat Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 249-259.
- Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 179-190. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Welle, D. (2021). *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. Diakses dari <https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir>.
- Wibowo, K. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Fadli Zon: Berdampak ke Penanganan Pandemi*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1431022/indeks-demokrasi-indonesia-turun-fadli-zon-berdampak-ke-penanganan-pandemi>.
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 176-185. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.41>
- Yuliani, A. (2017). *Ini Penyebab Maraknya Politik SARA*. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/12213/ini-penyebab-maraknya-politik-sara/0/sorotan_media.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.